

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dhesi yang artinya tempat kelahiran. Kehidupan di desa identik dengan kesederhanaan dan juga wilayah yang cukup agraris. Jika Anda melihat sawah yang membentang hijau bisa dipastikan itu berada di lingkungan desa. Istilah desa lainnya adalah suatu wilayah administratif yang terdiri dari kelurahan, kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga bisa diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan.¹ Menurut R. Bintarto menyatakan bahwa desa merupakan sebuah perwujudan dari segi geografis, ekonomis, budaya, sosial dan politik yang terdapat di suatu daerah dan mempunyai hubungan timbal balik antar daerah lainnya.² Sedangkan menurut dari Rifhi Siddiq menyatakan bahwa desa merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi sosial bersifat homogen

¹Amran, Y. S. Chaniago. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa ndonesia* . Bandung: Pustaka Setia. Hal. 210

²Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia. Indonesia, hal. 45.

dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di pedesaan berupa wilayah agraris.³

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lingkup desa tersebut terdapat suatu lembaga yang mengelola pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kemudian dalam pemerintah desa terdapat Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka hal ini membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan juga pemerintahan desa. Bentuk harapan baru tersebut adalah meliputi adanya pengakuan atas hak-hak asal usul desa, hak tradisional, serta pengakuan terhadap otonomi desa yang asli. Sejarah panjang untuk menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa

³ Rifhi Siddiq, 2006, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia, Hal. 37.

⁴ UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal. 2

heterogen serta kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini desa akan berpeluang menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang cukup besar. Besarnya nilai APBDesa itu sangat bervariasi dan jumlahnya mendekati satu milyar rupiah per desa atau bahkan bisa memperoleh lebih dari satu milyar yang tergantung dari kondisi desa yang bersangkutan. Hal ini jika dibandingkan dengan besarnya dana ADD sangat tidak berimbang, mengingat jumlah ADD hanya mencapai puluhan atau bahkan hanya mencapai ratusan juta rupiah.

Pendapatan desa lainnya adalah dari bagi hasil pajak, retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, propinsi maupun dari pemerintah pusat dengan besaran yang tidak menentu. Namun untuk dalam proses pelaporan atau pertanggungjawaban yang sangat rumit dan membutuhkan keahlian tersendiri agar tidak memberatkan pemerintah desa yang menerimanya.

Hal yang mengkhawatirkan adalah terjadinya pengelolaan yang membutuhkan kerja keras para pejabat di pemerintahan desa sekaligus bentuk pertanggung jawaban yang harus dipersiapkan. Dengan adanya pemberian dana untuk desa yang cukup besar tersebut pemerintah perlu melakukan hal-hal untuk melatih yang mencakup kemampuan pengelolaan keuangan, kemampuan manajerial kepada pemerintah desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini mengambil sebuah judul: Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014 (studi kasus implementasi dana desa di Desa Sidorejo Kebonsari Kabupaten Madiun).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014 ?
2. Bagaimana implementasi dana desa di Desa Sidorejo sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui kesiapan pemerintah Desa dalam melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014.
2. Ingin mengetahui pelaksanaan dana desa di Desa Sidorejo sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka diharapkan:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Desa di desa Sidorejo tersebut.

2. Studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah didalami pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi terhadap keberadaan dan pengelolaan bantuan desa yang berbentuk APBDesa.
4. Menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisa dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

E. Penegasan Istilah

1. Kesiapan

Menurut Soemanto (1998:191) ada yang mengatakan bahwa readiness sebagai kesiapan atau kesediaan orang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.⁵

2. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

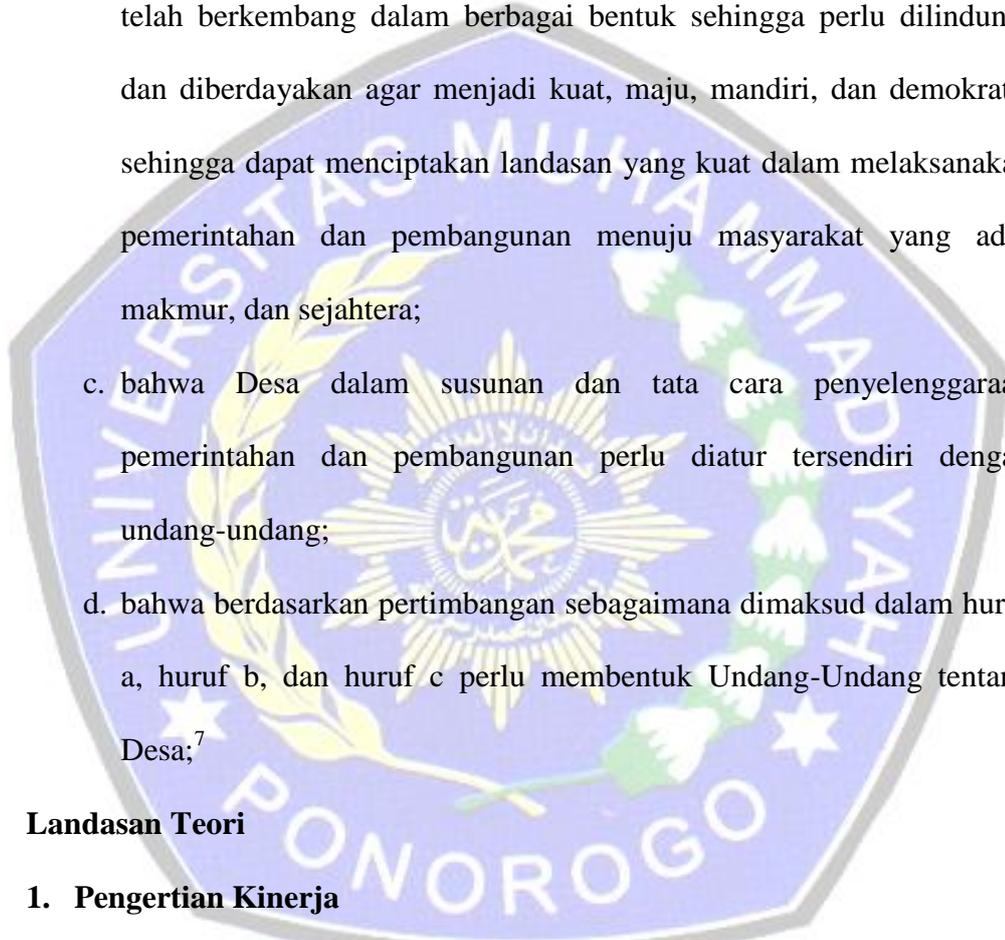
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Dasar pembuatan Undang-unang nomor 6 tahun 2014 adalah:

⁵ Soemanto, Wasty. 2006. *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan* (Cetakan Ke 5). Jakarta: Rineka Cipta, hal 191.

⁶ DPR-RI 2009, *Undang-undang nomor 6 tahun 2014*.

- 
- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;⁷

F. Landasan Teori

1. Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja dari kata kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang)

⁷ DPR-RI 2009, Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.⁸ Nawawi menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ non material.⁹ Menurut Simanjuntak, Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Foster dan Seeker menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.¹¹

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas yang dimaksud disini adalah dilihat dari kehalusan, kebersihan dan ketelitian dalam pekerjaan sedangkan kuantitas dilihat dari jumlah atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan.¹²

⁸A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. hal. 62-63.

⁹Hadari Nawawi, et.al. 2006. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta : UGM Press, hal.38

¹⁰ Payaman Simanjuntak J. 2011, *Manajemen dan Evaluasi kinerja*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, hal. 46.

¹¹ Foster, B dan Karen R. Seeker. (2001). *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Penerjemah: Ramelan. Jakarta: PPM, hal. 53

¹² A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, *Manajemen* hal. 67.

Tika mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.¹³ Oleh karena itu kinerja merupakan hal yang paling penting dijadikan landasan untuk mengetahui tentang performance dari karyawan tersebut.

Bentuk kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok. Dengan melakukan penilaian demikian, seorang pimpinan akan menggunakan uraian pekerjaan sebagai tolak ukur, bila pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, berarti pekerjaan itu berhasil dilaksanakan dengan baik.

2. Kinerja Pemerintahan

Untuk mewujudkan kinerja yang tinggi, tentunya diperlukan adanya manajemen kinerja yang baik. Terdapat kesepakatan umum tentang pentingnya implementasi manajemen kinerja pada sektor publik.¹⁴ Penerapan manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pemimpin dan bawahannya. Lebih lanjut Irfan mengemukakan manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep

¹³Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 121.

¹⁴Pastuszkova dan Palka. 2011. *Performance Management in The Sphere of Public Administration*. Annuals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, Volume 22 No. 1, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, hal. 77.

manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan cara mempegunakan orang yang ada di organisasi tersebut secara maksimal.¹⁵

Salah satu hal penting dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mendapatkan perhatian sejak munculnya konsep *New Public Management*. Kinerja diukur melalui penggunaan pengukuran kinerja dimana suatu matrik digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi atau efektivitas dari suatu kegiatan.¹⁶ Hatry mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai pengukuran secara reguler terhadap hasil (*outcome*) dan efisiensi dari pelayanan atau program.¹⁷ Poister menyatakan sistem pengukuran kinerja merupakan sistem manajemen yang melacak ukuran kinerja pilihan secara reguler untuk menilai kinerja meningkatkan pengambilan keputusan terprogram, kinerja, dan akuntabilitas.¹⁸

Manajer publik tidak meragukan kemungkinan penggunaan pengukuran kinerja untuk evaluasi, pengendalian, penganggaran, promosi, dan perbaikan.¹⁹ Simon (2000) mengemukakan dalam pengukuran kinerja sektor swasta terdapat lima keseimbangan yang perlu diperhatikan yaitu laba, pertumbuhan, pengendalian, hasil jangka pendek terhadap

¹⁵Fahmi, Irfan. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 67.

¹⁶Matthews, Joseph R. 2011. *Assesing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures*. Library Quarterly Vol. 81 No. 1, The University of Chicago., hal. 47.

¹⁷Hatry, Harry P. *Performance Measurement Getting Results*. The Urban Institute Press, Washington D.C., hal. 71.

¹⁸Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, CA. hal. 68.

¹⁹Behn, Robert D. 2003. *Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures*. Public Administration Review Vol. 63 No. 5, pp. 586-606.

kapabilitas jangka panjang dan peluang pertumbuhan, harapan kinerja dari konstituen yang berbeda, peluang dan atensi, dan motif dari perilaku manusia.²⁰

Pengukuran kinerja mempunyai banyak manfaat bagi organisasi. Meskipun terdapat sedikit bukti efektivitasnya, sistem pengukuran kinerja terus diimplementasikan didasarkan pada asumsi bahwa sistem pengukuran kinerja ini akan mempunyai dampak positif terhadap kinerja.²¹ Hatry mengemukakan pengukuran kinerja berhubungan dengan aktivitas evaluasi lainnya yaitu evaluasi program dan studi mendalam lainnya, hubungan dengan audit kinerja, dan perencanaan strategis, penganggaran, dan analisis kebijakan.²² Pengukuran dan pelaporan kinerja bermanfaat untuk meningkatkan program dan akuntabilitas.²³ Bourne, Kennerley & Franco-Santos (2005) lebih lanjut mengemukakan sistem pengukuran kinerja digunakan untuk mendukung berbagai fungsi manajemen diantaranya:²⁴

- Monitoring dan pelaporan
- Perencanaan strategis
- Penganggaran dan manajemen keuangan

²⁰Simon, Robert. 2000. *Performance Measurement & Control System for Implementing Strategy*. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.

²¹Bourne, Kennerley & Franco-Santos. 2005. *Managing Through Measures: a Study of Impact on Performance*. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16, No. 4, pp. 373-395.

²²Hatry, Harry P. *Ibid*, hal. 71.

²³Hildebrand, Richard dan James C. McDavid. 2011. *Joining Public Accountability and Performance Management: A Case study of Lethbridge, Alberta*. Canadian Public Administration/Administration Publique Du Canada Volume 54, No. 1 (March/Mars 2011), pp. 41-72.

²⁴Bourne, Kennerley & Franco-Santos. *Ibid*, pp. 373-395.

- Manajemen program
- Evaluasi program
- Manajemen kinerja
- Peningkatkan kualitas, peningkatan proses
- Manajemen kontrak
- *Benchmarking*
- Komunikasi dengan publik

Mardiasmo menjelaskan terdapat tiga maksud dalam pengukuran kinerja yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.²⁵

Manfaat pengukuran kinerja menurut lebih lanjut disampaikan oleh Mardiasmo adalah pertama memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan

²⁵Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Keenam, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.²⁶

Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Michael P. Todaro bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.²⁷

3. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.²⁸

²⁶ Mardiasmo. 2004. *Ibid*, hal. 64.

²⁷ Kamaludin, Rustian. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta:Ghalia Indonesia., hal. 9.

²⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 68.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Agostino, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena

²⁹ Agostino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung. Hlm. 139.

kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.³⁰

Dalam Undang-undang tersebut juga disampaikan tentang kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangankabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dengan demikian desa merupakan suatu lokasi yang terdapat batas-batas yang membedakan antara desa satu dengan desa lainnya, kemudian dalam aktivitasnya melakukan pelayanan dan mempunyai hak untuk mengatur wilayah desa tersebut.

³⁰DPR-RI 2009, *UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*.

5. Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Undang-Undang Desa adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa yang berkembang dalam bermacam bentuk. Banyaknya bentuk keberadaan desa ini tak pelak butuh dilindungi dan juga diberdayakan dengan tujuan supaya menjadi semakin kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga semua lapisan masyarakat akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan dan kesejahteraan bersama.

Munculnya UU Desa ini tak lain adalah sebagai bentuk tatanan mengenai desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. Hal yang perlu disadari, bahwa sejatinya desa di setiap daerah ini telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Artinya, keberadaan UU Desa ini menjadi langkah yang sah dalam mengembalikan beragam tatanan sesuai adat dan aturan lokal sebelum diseragamkan oleh rezim Orde baru, dengan tujuan agar kesejahteraan bisa benar-benar menyentuh rakyat tataran bawah.

Beberapa materi yang diatur oleh Undang-Undang Desa antara lain adalah tentang;

1. Asas Pengaturan
2. Penataan Desa
3. Kewenangan Desa

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
6. Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa
7. Kedudukan dan Jenis Desa
8. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
9. Badan Usaha Milik Desa (*Bumdesa*)
10. Kerja Sama Desa
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
12. Pembinaan dan Pengawasan.

Undang-Undang Desa juga mengatur dengan ketentuan khusus yang diberlakukan untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

G. Definisi Operasional

Salah satu faktor yang membantu komunikasi dalam penelitian adalah definisi operasional yang merupakan sebagai petunjuk tentang bagaimana variable itu diukur. Dengan membaca definisi operasional seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variable sehingga dia dapat mengetahui baik dan buruknya.³¹

Definisi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan UU No. 6 th. 2014 tentang desa dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kesiapan pemerintah desa dan implementasinya.

1. Indikator kesiapan pemerintah desa :

³¹ Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Salemba humanika.

- a. Kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
 - b. Apa yang sudah dilakukan pemerintah desa.
 - c. Cara mengatasi staf yang kurang secara SDM.
2. Indikator implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa :
- a. Waktu penerapan dan bagaimana pelaksanaannya.
 - b. Kendala yang dihadapi.
 - c. Manfaat yang diambil.
 - d. Implementasi/ penggunaan dana desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif naratif, dikarenakan ada beberapa pertimbangan di antaranya adalah: penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif; penyajian data dilakukan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden; lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan.³²

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif naratif. Menurut Bogdan dan Tylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexi Moleong

³² Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hal. 71.

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang menjadi tempat kegiatan pemerintahan desa yang dalam aktivitasnya menggunakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan APBDesa dan menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat desa.

3. Tehnik Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Metode penentuan subjek sering disebut sebagai metode penentuan sumber data. Maksud dari sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³⁴Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Seluruh Perangkat Desa Sidorejo, dan Seluruh Tim Pelaksana Program yang menggunakan dana Desa dan secara langsung diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Secara operasional, penelitian ini membutuhkan penentuan subjek yaitu teknik populasi dan teknik sampling.

a) Populasi

³³ Lexi Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 3.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157- 160.

Populasi adalah keseluruhan pihak yang dalam penelitian dijadikan sebagai sasaran penelitian.³⁵ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa Sidorejo 1 orang, BPDDesa Sidorejo 5 orang, Kaur Desa Sidorejo 3 orang, Staf Pemerintahan Desa Sidorejo 3 orang, Kepala Dusun 5 orang, dan tim pelaksana pembangunan desa 3 orang.

b) Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) dikenakan pada populasi (generalisasi). Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau random sampling / probability sampling dan sampel tidak acak atau nonrandom sampling/nonprobability sampling.³⁶

Berdasarkan jumlah populasi di pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun yang besar dan berdasarkan pada tujuan penelitian yang melihat bagaimana kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka cara pengambilan sampel secara tidak acaknya ini dengan teknik bola salju (*Snowball Sampling*) yakni penarikan sampel secara bola salju.

³⁵ Arikunto, Suharsimi, 2010. *Ibid*, hal. 90

³⁶ S. Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 126

Proses pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari satu unit ke unit lain sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data cukup sesuai kebutuhan.³⁷

c) Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa 1 orang, Kepala Dusun 2 orang, Bendahara Desa 1 orang, Staf Pembangunan 1 orang dan Operator Desa 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini digunakan dengan menarik

³⁷Arikunto, Suharsimi, 2010. *Ibid*, hal. 115

kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.³⁸

a) Metode Observasi Nonpartisipan

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁹ Peneliti dalam penelitian ini adalah meneliti secara observasi non partisipan, jadi peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun, yaitu melihat-lihat lokasi penelitian, memperhatikan perilaku informan, mendengarkan pendapat informan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam observasi adalah sebagai berikut:

- a. Observasi deskriptif, observasi ini dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum, dan menyeluruh,

³⁸ Nana Sunjana, 1992, *Menyusun Karya Tulisan Ilmiah, untuk Memperoleh Angka Kredit*, Bandung: Sinar Baru, hal. 7

³⁹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 63.

melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata.

b. Observasi terfokus, pada tahap ini peneliti sudah melakukan mini tour observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu.

c. Observasi terseleksi, pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci, dengan begitu pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan, dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori lain.⁴⁰

b) Interview/Wawancara

Interview/ wawancara adalah menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Lexi bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁴¹ Metode ini merupakan metode untuk mencari data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴²

⁴⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 231.

⁴¹ Lexy J, 2001, *Ibid*, hal. 186.

⁴² Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1991), h. 153.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam.⁴³

Metode wawancara, peneliti gunakan untuk mencari informasi tentang kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Peneliti melakukan wawancara kepada 1 orang Kepala Desa, 2 orang Kepala Dusun, 1 orang bendahara Desa, 1 orang Staf Pembangunan dan 1 orang operator. Di desa Sidorejo kecamatan Kebonsari Madiun.

c) Dokumentasi

Menurut Margono, dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga bukubuku tentang pendapat, teori dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁴

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini, dikarenakan sangat penting sekali untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁴³ Arikunto, Suharsimi, 2010. *Ibid*, hal. 203

⁴⁴ Margono, 2000, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 181.

- a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan di cari datanya.
- b. Check list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.
Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda atau tally setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti butuhkan adalah sejarah Kabupaten Madiun, Keadaan geografis, Keadaan Penduduk, Sarana prasarana Desa, dan organisasi Pemerintahan Desa Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014

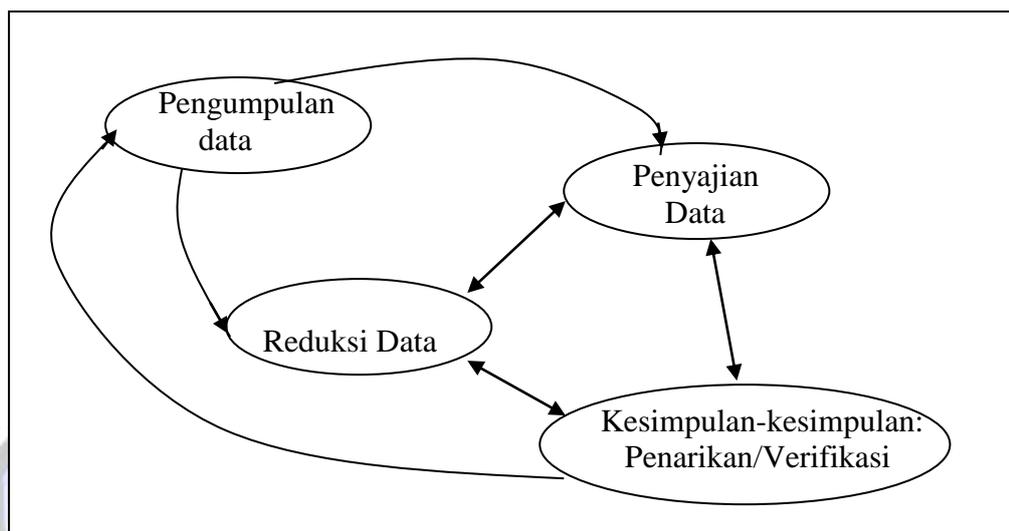
5. Tehnik Analisa Data

Cara yang digunakan untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Handari menyatakan: Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang.⁴⁵

Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa: dalam pandangan model

⁴⁵ Nawawi dan Handari, 2003, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 26

interaktif ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).⁴⁶Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Sumber data: Sugiyono, 2012

Gambar 1.1. Model Interaktif

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat) yang berhubungan secara langsung dan merasakan implementasi Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014. Jawaban informen yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

⁴⁶ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 337.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.⁴⁷

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan

⁴⁷ Sugiyono, 2012, hal 338

ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelahaan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian.⁴⁸

Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat

⁴⁸ Sugiyono, 2012, hal 340

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

